



RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KARIMUN



TAHUN 2026

Jalan Jenderal Sudirman, Poros
Gedung Gunung Papan Lantai II

website : www.disnakerprind.info

email : disnakerind.karimun@gmail.com



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, dimana kami telah dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pasal 126 s.d 129, yang menyatakan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Menindaklanjuti peraturan tersebut maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun harus menyusun Rencana Kerja Tahun 2026 sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun.

Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban formal atas semua pelaksanaan program ,kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja ini menyajikan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun sebelumnya (2024) yang berintikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya dan capaian Renstra Perangkat Daerah, Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi, tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta Rencana Kerja serta pendanaan Perangkat daerah pada tahun 2026 yang akan datang.



Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan Rencana Kerja ini, semoga Allah S.W.T selalu meridhoi-Nya, aamiin.

Tg. Balai Karimun, 7 Oktober 2025

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN**



Ir. H. RUFFINDY ALAMSJAH, M.App. Sc
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP.196710031992031010



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-4
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika	I-8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	II-10
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Perkiraan Capaian Tahun Berjalan	II-10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-21
2.4 Riviui Terhadap Rancangan Awak RKPD	II-24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-31
3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional	III-31
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-34
3.3 Program dan Kegiatan	III-35
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-38
BAB V PENUTUP	V-47



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	II-11
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 - 2024	II-19
Tabel 2.3	Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026	II-23
Tabel 3.1	Tahap I Pembangunan Kabupaten Karimun	III-31
Tabel 3.2	Tahap I Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ..	III-32
Tabel 3.3	Program Prioritas (Unggulan)	III-33
Tabel 3.4	Tujuan Perangkat Daerah	III-34
Tabel 3.5	Sasaran Perangkat Daerah	III-35
Tabel 3.6	Program dan Kegiatan	III-35
Tabel 4.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun	IV-39



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah	I-3
Gambar 2 Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Lainnya	I-4



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

- Pengertian Renja Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang

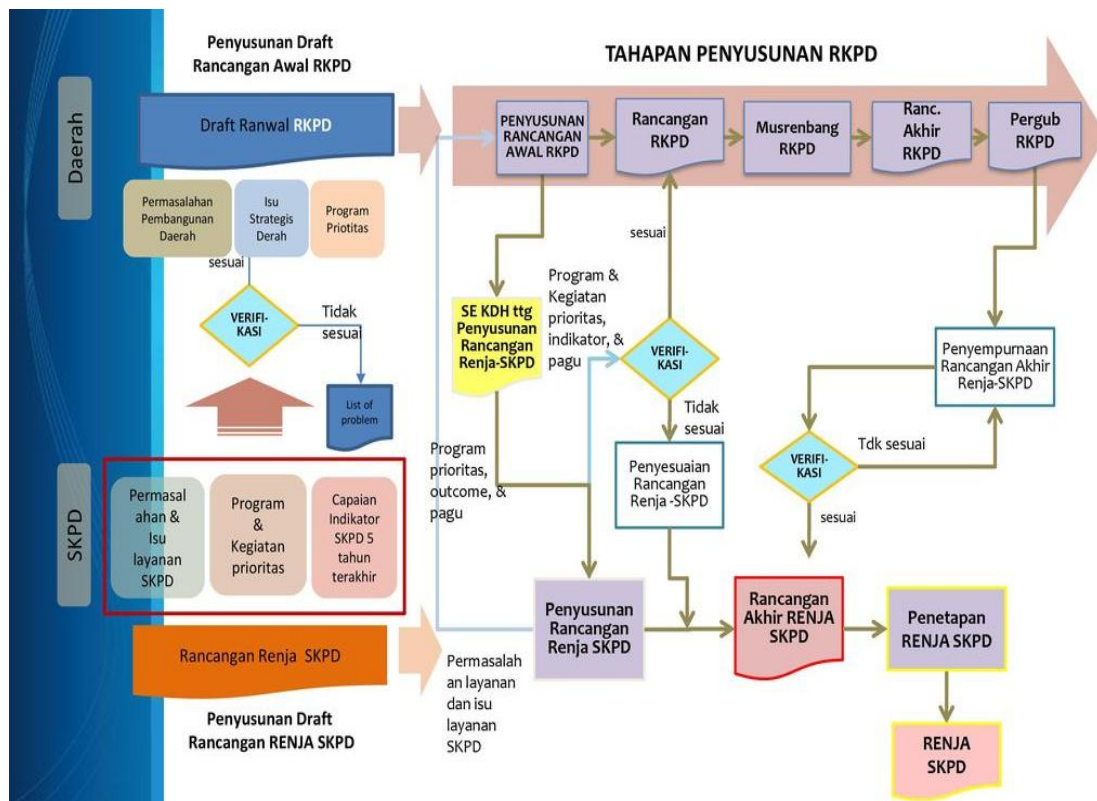


selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

- **Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Renja, dan penetapan Renja. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju. Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 1 Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah



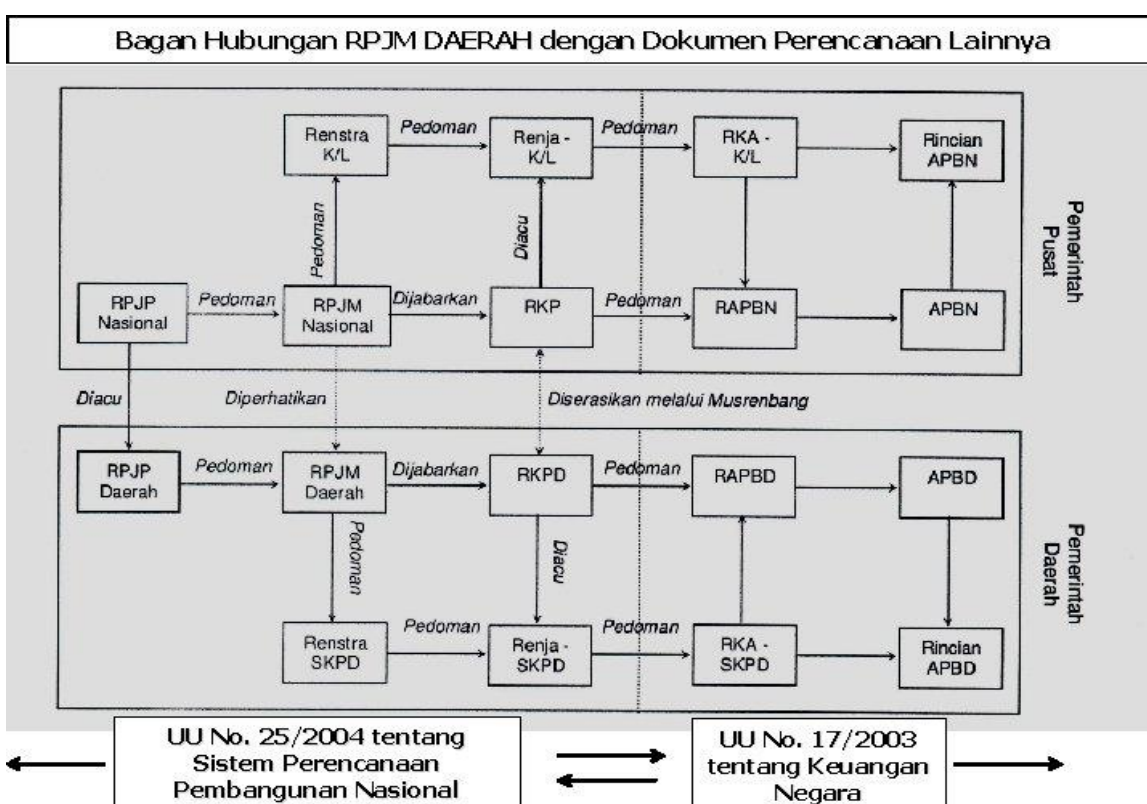
- Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya. Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan

dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD. Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 2 Keterkaitan Renja PD dengan Dokumen Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902),



- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 - m. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;



- n. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- o. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan (Lembaran daerah Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 6);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 5);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karimun Tahun 2021 – 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2021 Nomor 3);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);
- t. Peraturan Bupati Karimun Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 50);



- u. Peraturan Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 2);

1.3 Maksud dan Tujuan

- Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

- Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 adalah sebagai berikut :



BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Memuat latar belakang, yaitu pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya;
- 1.2 Landasan hukum;
- 1.3 Maksud dan tujuan dan;
- 1.4 Sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024

- 2.1 Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan capaian Renstra;
- 2.2 Analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun;
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun;
- 2.4 Review terhadap awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

- 3.1 Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karimun
- 3.3 Program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KARIMUN

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun untuk tahun anggaran 2024 telah mendapat alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Karimun sebesar Rp. 8,045,128,978,- untuk melaksanakan 5 (lima) Program dan 15 Kegiatan dan setelah Perubahan Anggaran menjadi Rp. 7,245,056,086,- Jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 6,886,560,359,- atau 95,05 Persen. Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun sebagaimana table berikut :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun s.d Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan (Renstra 2021 s/d 2026)					Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan(Output) (Renstra 2021 s/d 2026)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021 s/d 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s.d. Renja PD Tahun Lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2) 2024			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)	
										Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2024)	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024 (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1) 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4							
						Nilai Akip	Nilai	73		Blm Terbit			74	74	100
2						Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2	7					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2	7	1				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	89.92	80	80	100,00	80	100,00
2	7	1	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokume n	36	10	4	4	100,00	4	100,00
2	7	1	2	01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokume n	11	4	1	1	100,00	1	100,00
2	7	1	2	01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Relisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	15	4	2	2	100,00	2	100,00



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2	7	1	2	01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	2	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen dan Laporan Administrasi Keuangan	Dokumen	14	5	2	2	100,00	2	2	100,00
2	7	1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	1608	728	464	372	80,17	464	464	100
2	7	1	2	02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas Asn	Dokumen	5	2	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan	1	0	1	0	0,00	1	1	100
2	7	1	2	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	0		0	0,00	1	1	100
2	7	1	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	22	6	6	6	100,00	6	6	100
2	7	1	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	1	1	0	0	0	0	0
2	7	1	2	06	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	5	1	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	06	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2	7	1	2	06	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	06	6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	0	0	0	1	1	100
2	7	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1			0	0,00	1	1	100
2	7	1	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	4			0	0,00	3	3	100
2	7	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	30	4	2	2	100,00	2	2	100,00
2	7	1	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	15	2	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	15	2	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	3	3	3	3	100,00	3	3	100,00
2	7	1	2	09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	2	2	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	1	2	09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	4	1	1	100,00	1	1	100,00



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00			
PREDIKAT KINERJA													ST			
							Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	6	6,02	7.10	5.52	122.25	5,48 -5,50	5,49	100
							Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	65,27	64,79	62	68,25	110,08	69,71	69,71	100
2	7	3					Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	58.00	23.87	53,57	32,36	60,41	53,45	53,45	100
2	7	3	2	01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persen	30	30	12	11,5	95,83	25	25	100
2	7	3	2	01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	2810	580	137	137	100,00	135	135	100
2	7	3	2	01	3	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit	5	0	0	0	0,00	2	2	100
2	7	3	2	05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	5	2	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	3	2	05	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen	5	2	1	1	100,00	1	1	100,00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													60,41			
PREDIKAT KINERJA													R			
2	07	4					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persen	47.25	91.22	46,75	95,80	100,00	94	94	100
							Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing (IMTA)	Rupiah (Milyar)	10.600.000.000	815.000.000	2.000.000.000	2.050.294.500	100,00	2.000.000.000	2.000.000.000	100



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2	07	4	2	01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelayanan Antar Kerja	Dokumen	5	2	2	2	100,00	2	2	100,00
2	07	4	2	01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	100	30	30	30	100,00	30	30	100,00
2	07	4	2	01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	100	30	30	30	100,00	30	30	100,00
2	7	4	2	03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah perusahaan yang mempublikasikan kesempatan kerja	Perusahaan	35	30	350	339	96,86	200	200	100
2	7	4	2	03	1	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen	5	2	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	4	2	04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia	Orang	0	0	16	15	93,75	25	25	100
2	7	4	2	04	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMT yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani (Orang)	Orang	0	0	16	15	93,75	25	25	100
2	7	4	2	05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpanjangan IMTA	Orang	555	102		0	0,00			
2	7	4	2	05	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	Laporan	5	2		0	0,00			
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00			
PREDIKAT KINERJA													ST			
2	7	5				Program Hubungan Industrial	Penyelesaian kasus yang difasilitasi	Kasus	28	5	3	1	100,00	3	3	100
2	7	5	2	01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian	Jumlah Perusahaan yang telah memiliki PP	Perusahaan	30	31	35	35	100,00	25	25	100



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

						Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB	Perusahaan	4	4	4	6	150,00	4	4	100
2	7	5	2	01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	5	2	02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	5	1	1	1	100,00	1	1	100,00
2	7	5	2	02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													100,00			
PREDIKAT KINERJA													ST			
						PDRB Perkapita	Juta (Rp)		76,59							
						Rasio Pelaku Usaha (IKM) terhadap jumlah penduduk	Persen		0,68	0,63	0,55	0,67	0,00	0,66	0,66	100
3						Urusan Pemerintahan Pilihan										
3	31					Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian										
3	31	2				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	Persen	88.90		1.8	0	0,00	1,5	1,5	100
3	31	2	2,01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	15	3	2	2	100,00	3	3	100,00
3	31	2	2	01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5	1		0	0,00	1	1	100,00
3	31	2	2	01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Dokumen	5	1	1	1	100,00	1	1	100,00



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

						Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat									
3	31	2	2	01	3	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen	5	1	1	1	100	1	1	100
RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)													0,00			
PREDIKAT KINERJA													SR			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													72,08			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM 6)													T			



2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja merupakan dasar dalam mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan target kinerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun telah dapat terlaksana dengan baik.

Adapun uraian dan analisis mengenai capaian sasaran dan indikatornya dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2022 - 2024

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Baseline	Target Renstra SKPD Tahun			Realiasi			Capaian		
						2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja				60,86	61,21	61.50	62	60,46	64.79	68,25	98,77	100	100
2	Rasio Tenaga Kerja Lokal Terhadap Seluruh Tenaga Kerja				95,45	91,45	97.75	97,75	99,60	95.79	97,13	100	97,99	99,36
3	Rasio IKM Terhadap Jumlah Penduduk				0,60	0,66	0.50	0,55	0,61	0,63	0,67	92,42	126	100
4	Nilai Akip				6,92	73	73	73	50,08	60,98	Blm Terbit	68,60	83,53	-
5	Level Kematangan Manajemen Resiko							3			3,142			100
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi				23,87	56,45	53,45	53,57	48,80	53,57	32,36	86,45	100	60,40
7	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan					45,15	55,15	46,75	74,43	52,96	95,79	100	96,03	100
8	Penyelesaian kasus yang Difailiasi				18	5	3	3	7	3	1	1,40	100	100
9	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin				59,65	69,65	4,50	1,8	9,38	4,38	0	13,47	97,33	0
10	Jumlah Dokumen Informasi industri secara lengkap dan terkini				1	1	1	1	1	1	1	100	100	100
11	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				75	75	80	80	75	90,06	80	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Tenaga Kerja dan perindustrian yang akan dilaksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan pelaksanaan program dan kegiatan tidak banyak terkendala dan dibatalkan pelaksanaan kegiatan utamanya sehingga berakibat capaian kegiatan dan program dapat tercapai.

A. Permasalahan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja dan dan Perindustrian Pada Tahun 2026 antara lain adalah :

1. Urusan Ketenagakerjaan

- Masih Relatif Rendahnya kemampuan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan khusus pada bidang-bidang usaha.
- Masih banyak perusahaan yang belum menerapkan struktur skala upah.
- Masih terdapat perusahaan yang belum menerapkan norma ketenagakerjaan sesuai aturan.
- Masih rendahnya komitmen perusahaan untuk merekrut dan melindungi para tenaga kerja wanita dan penyandang disabilitas.
- Masih banyaknya perusahaan yang tidak menginformasikan lowongan pekerjaan.
- Kurangnya pengetahuan pencaker dalam penggunaan teknologi.

2. Urusan Perindustrian

- Terbatasnya sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian
Keterbatasan sarana dan prasarana produksi di bidang perindustrian terutama terjadi pada IKM sehingga tidak dapat memberikan output yang maksimal.
- Belum optimalnya pemanfaatan skema permodalan yang tersedia
Permasalahan permodalan juga terutama dialami oleh IKM dalam pengembangan usaha, terutama untuk pemenuhan alat produksi.
- Rendahnya kerjasama (kemitraan) antara pelaku IKM dengan perusahaan-perusahaan berskala besar khususnya BUMN dan swasta nasional lainnya.

B. Isu Penyelenggaraan pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian yakni :**1. Urusan Ketenagakerjaan**

- Tenaga Kerja yang belum optimal menjawab kebutuhan pasar.
- Tingginya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja.
- Masih terbatasnya kompetensi calon tenaga kerja dalam menjawab kebutuhan pasar kerja, sehingga masih perlu peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
- Output pendidikan belum sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match).

2. Urusan Perindustrian

- Belum optimalnya perkembangan IKM dan menjadi tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi.
- Masih banyak wirausaha IKM kekurangan modal, ketrampilan belum optimal dan pemasaran yang belum maksimal serta belum mampu memberikan akses permodalan pada wirasusaha IKM.
- Masih ada IKM yang tidak aktif dan tidak sehat yang akan menjadi target pembangunan kedepan.
- Belum optimalnya pengembangan industri kecil dan sentra industri menjadi permasalahan tersendiri di Kabupaten Karimun.
- Sentra-sentra industri yang dibentuk harus dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar di Kabupaten Karimun dan Kabupaten Kota sekitar.

2.4 Riviui Terhadap Rancangan Awal RPKD

Penyusunan Renja awal Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 sejalan dengan Rancangan Awal RPKD Kabupaten Karimun Tahun 2026, yang telah dituangkan secara rinci dan jelas dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun. Bilamana dalam proses perkembangannya terjadi perubahan dalam RPKD baik berupa prioritas, isu strategis maupun kemampuan keuangan yang tidak sesuai lagi dengan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Tahun 2026 maka RPKD Kabupaten



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Karimun Tahun 2026 tetap menjadi pedoman utama, seperti dapat dilihat pada table 2.3 di bawah ini :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Tabel 2.3 Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026

KODE	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Indikator Kinerja Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024	Rencana Tahun 2026		
			Target	Rp	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			13.375.000.000	
2,07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			13.375.000.000	
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6.975.000.000	
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			125.000.000	
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	PAD
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	40.000.000	PAD
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	35.000.000	PAD
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5.084.500.000	
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang	4.989.500.000	PAD / DAU
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	95.000.000	PAD
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			380.000.000	
2.07.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Paket	85.000.000	PAD
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	165.000.000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2.07.01.2.05.0004	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	45.000.000	PAD
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	40.000.000	PAD
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			517.500.000	
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	PAD
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	85.000.000	PAD
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	8.500.000	PAD
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	9.000.000	PAD
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	7.000.000	PAD
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	230.000.000	PAD
2.07.01.2.06.00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	175.000.000	PAD
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			330.000.000	
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	155.000.000	PAD
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	175.000.000	PAD
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			385.000.000	
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	35.000.000	PAD
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	350.000.000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			153.000.000	
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	70.000.000	PAD
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	55.000.000	PAD
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	28.000.000	PAD
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			240.000.000	
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			240.000.000	
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20 Dokumen	125.000.000	PAD
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	15 Orang	115.000.000	PAD
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			4.905.000.000	
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			4.740.000.000	
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	250 Orang	3.885.000.000	PAD / DAU
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	4 Lembaga	55.000.000	PAD
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	150.000.000	PAD / DAU
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	150 Orang	650.000.000	PAD / DAU
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			65.000.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	1 Lembaga	65.000.000	PAD
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			50.000.000	
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	10 Perusahaan	50.000.000	PAD
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1 Dokumen	50.000.000	PAD
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			610.000.000	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			355.000.000	
2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	10 Orang	50.000.000	PAD
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditwmpatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	15 Orang	65.000.000	PAD
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	20 Orang	115.000.000	PAD
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	20 Orang	125.000.000	PAD / DAU
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			155.000.000	
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	50.000.000	PAD
2.07.04.2.03.0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	20 Orang	50.000.000	PAD
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	50 Orang	55.000.000	PAD
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMT yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	30 Orang	50.000.000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.04.3.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			50.000.000	
2.07.04.3.05.0002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota yang Divalidasi	20 SKRD	50.000.000	PAD
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			645.000.000	
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			340.000.000	
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	10 Perusahaan	55.000.000	PAD
2.07.05.2.01.0001	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	5 Perusahaan	55.000.000	PAD
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	1 Laporan	230.000.000	PAD
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			305.000.000	
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	8 Perkara	45.000.000	PAD
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	6 Perkara	50.000.000	PAD
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	125.000.000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	20 Orang	85.000.000	PAD
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			1.100.000.000	
3,31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.100.000.000	
3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			840.000.000	
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			840.000.000	
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	70.000.000	PAD
3.31.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen	50.000.000	PAD
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	50.000.000	PAD
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen	70.000.000	PAD
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	320.000.000	PAD
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	70.000.000	PAD
3.31.02.2.01.0007	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	50.000.000	PAD



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

3.31.02.2.01.0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	1 Dokumen	60.000.000	PAD
3.31.02.2.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	1 Laporan	50.000.000	PAD
3.31.02.2.01.00010	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatanpenyebaran dan perwilayahan industri	1 Rekomendasi	50.000.000	PAD
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			110.000.000	
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			110.000.000	
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	60.000.000	PAD
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen	50.000.000	PAD
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			150.000.000	



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			150.000.000	
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	1 Dokumen	50.000.000	PAD
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		50.000.000	PAD
3.31.04.2.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen	50.000.000	PAD
TOTAL PAGU ANGGARAN				14.475.000.000	



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengangkat tema “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Prioritas pembangunan tahun 2026 menekankan tiga pesan utama yaitu :

1. Meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air;
2. Mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing;
3. serta menjamin inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal.

Program prioritas unggulan yang diusung antara lain Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta unit rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Pendidikan, Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu, serta Pengelolaan Sampah Terpadu.

Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2026

Tema Pembangunan Kabupaten Karimun Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Tahap I Pembangunan Kabupaten Karimun

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahap Penataan	Tahap Pengembangan	Tahap Penguatan	Tahap Pematapan	Tahap Perwujudan
Penataan Potensi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Akuntabel dan	Pengembangan Potensi Perekonomian yang Didukung dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan	Penguatan Potensi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan pengelolaan Sektor Unggulan Daerah yang Berwawasan	Pematapan Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan Konektivitas dan Infrastruktur yang Berkualitas	Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karimun yang



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Melayani Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya	Berdaya Saing Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya	Lingkungan Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya	Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya	Maju, Sejahtera dan berbudaya
---	---	--	---	-------------------------------

Sebagaimana tabel diatas Pembangunan Tahun 2026 mengambil tema: *“Penataan Potensi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Akuntabel dan Melayani Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya”*.

Sesuai dengan tema tersebut, diuraikan prioritas pembangunan sebagai berikut:

- Penataan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing melalui optimalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas.
- Penataan sarana infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang lebih merata dan berkelanjutan.
- Penataan perekonomian daerah melalui penguatan unggulan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- Penataan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tema Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026

Tema Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Tahap I Pembangunan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 Perangkat Daerah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tahap Penataan	Tahap Pengembangan	Tahap Penguatan	Tahap Pemantapan	Tahap Pematangan



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Menata berbagai sistem, sumber daya sarana dan prasarana pendukung untuk mengembangkan guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin melalui optimalisasi penanganan masalah industri kecil dan menengah dan ketenagakerjaan	Mengembangkan berbagai sistem, sarana dan prasarana, potensi sumber daya serta instrumen pendukung yang kondusif untuk penanganan masalah industri kecil dan menengah serta ketenagakerjaan	Memperkuat instrument pendukung yang kondusif untuk memantapkan terwujudnya kesejahteraan industri kecil dan menengah serta ketenagakerjaan	Melakukan pemantapan terhadap, sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung guna terwujudnya kesejahteraan industri kecil dan menengah serta ketenagakerjaan	Mematangkan sistem, sarana, potensi dan sumber daya pendukung guna terwujudnya kesejahteraan industri kecil dan menengah serta ketenagakerjaan
--	---	---	---	--

Sebagaimana tabel diatas maka Program pembangunan daerah (RPJMD) yang disusun berdasarkan program prioritas kepala daerah memiliki peran penting dalam mempercepat laju pembangunan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan merumuskan kebijakan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, kepala daerah bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap tantangan yang ada, Program Prioritas (Unggulan) yang ada dalam RPJMD Kabupaten Karimun 2025-2029 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3 Program Prioritas (Unggulan) RPJMD 2025 – 2029

No	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	URAIAN
1	Tahap I Tema : <i>"Penataan Potensi Perekonomian dan Sumber Daya Manusia yang Didukung dengan Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Akuntabel dan Melayani Menuju Karimun yang Maju, Sejahtera dan Berbudaya"</i>	1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 2. Program Penempatan Tenaga Kerja	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Karimun maka Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berkontribusi dalam Pencapaian visi dan misi Ke-Tiga dan Ke-Lima dalam RPJMD Kabupaten Karimun yaitu :

Misi Ke-Tiga : Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Misi Ke-Empat : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa

Untuk mencapai itu Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun berperan aktif dalam melaksanakan pencapaian **sasaran** yang ada dalam **RPJMD** yang merupakan **Tujuan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun.**

1.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan Strategis merupakan penjabaran implementasi dari misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun, secara rinci tujuan yang ditetapkan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tujuan Perangkat Daerah

Misi 3 : Menciptakan Pembangunan Sektor Ekonomi Melalui Penguatan Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target
A.	Urusan Perindustrian			
1	Meningkatkan Sektor Ekonomi Daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	15.10 % - 16.10
B.	Urusan Ketenagakerjaan			
2	Menciptakan Kesempatan Kerja dan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5.47-5.49

Misi 4 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Iman dan Taqwa				
No	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target



1.	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Inovatif Berbasis Digital	Nilai Maturitas SPIP	Nilai	3,60
----	--	----------------------	-------	------

1.2 Sasaran Perangkat Daerah

Selanjutnya tujuan strategis tersebut diuraikan menjadi beberapa sasaran dan ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Sasaran Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
A. Urusan Perindustrian				
1	Meningkatnya Sektor Ekonomi Daerah	Kontribusi Industri Non Migas Terhadap PDRB	Persen	15,60
B. Urusan Ketenagakerjaan				
2	Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal yang Kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	72,77
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disnakerin	Nilai Akip	Nilai	75
		Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	Nilai	3,162

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 yang akan dicapai sesuai dengan target yakni :

Tabel 3.6 Program dan Kegiatan

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Kegiatan
Urusan Ketenagakerjaan				



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Meningkatnya Pertumbuhan Tenaga Kerja Lokal Yang Kompetitif	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	72,77 %	1. Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
			2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
			3. Program Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
			4. Program Hubungan Industrial	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
			Urusan Perindustrian	
Meningkatnya Sektor Ekonomi Daerah	Kontribusi Industri Non Migas Terhadap PDRB	15,60 %	1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan ndustri Kabupaten/Kota
			2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
			3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
Meningkatnya Akuntabilitas	1. Nilai Akip 2. Level Kematangan	Nilai 75 Nilai 3,162	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Kinerja Disnakerin	Manajemen Resiko (MR) Disnakerin			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
-------------------------------	--	--	--	--



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran 2026 dan sekaligus merupakan referensi bagi Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun ini berisikan pedoman dan arahan dalam pelaksanaannya serta kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Mengingat keterbatasan sumber daya anggaran pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2026 harus dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk itu, diperlukan upaya keterpaduan dan sinergi dari elemen yang pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun baik sekretariat maupun bidang – bidang, demi mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan rapat koordinasi dan observasi sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, maka monitoring dan evaluasi harus menjadi kegiatan yang tak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan dan dilaksanakan pada setiap tahapan, agar diperoleh hasil yang maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya.

Adapun Rencana Kerja berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan, output, outcome, pagu indikatif dan sumber pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 dan periraan maju tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

Tabel 4.1 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Rencana Tahun 2026				Prakiraan Maju Tahun 2027	
			Lokasi	Target	Rp	Sumber Dana	Target	Rp
		Nilai Maturitas SPIP		3,60			3,80	
		Nilai Akip		75			75	
		Nilai Kematangan Manajemen Risiko (MR) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian		3,162			3,173	
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		83 Nilai	5.793.955.438		84 Nilai	5.535.455.435
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Kinerja Perangkat Daerah							
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Program OPD		95%	25.000.000		95%	25.000.000
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Karimun	1 Dokumen	10.000.000	PAD	1 Dokumen	10.000.000
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Karimun	2 Dokumen	10.000.000	PAD	2 Dokumen	10.000.000
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Karimun	1 Laporan	5.000.000	PAD	1 Laporan	5.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Serapan Anggaran OPD		96%	4.909.505.438		97%	5.047.505.435
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Karimun	830 Orang / Bulan	4.842.355.438	DBH/PAD	840 Orang / Bulan	4.980.355.435
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab Karimun	1 Dokumen	67.150.000	PAD	1 Dokumen	67.150.000
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Kerja Efektif		95%	135.000.000		95%	40.000.000
2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Karimun	1 Paket	95.000.000	PAD		
2.07.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Karimun	1 Dokumen	30.000.000	PAD	1 Dokumen	30.000.000
2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab Karimun	2 Orang	10.000.000	PAD	2 Orang	10.000.000
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti			353.700.000			232.200.000
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	3.000.000	PAD	1 Paket	3.000.000
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	55.000.000	PAD	1 Paket	55.000.000
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Karimun	1 Paket	9.000.000	PAD	1 Paket	9.000.000
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Karimun	1 Dokumen	5.000.000	PAD	1 Dokumen	5.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Karimun	1 Laporan	150.000.000	PAD	1 Laporan	150.000.000
2.07.01.2.06.00011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab Karimun	1 Dokumen	131.700.000	PAD	1 Dokumen	10.200.000
2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Asset OPD dalam kondisi baik		90%	180.000.000		90%	-
2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Karimun	5 Unit	30.000.000	PAD		
2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Karimun	5 Unit	150.000.000	PAD		
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perangkat Daerah		2 Laporan	53.750.000		2 Laporan	53.750.000
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Karimun	1 Laporan	35.000.000	PAD	1 Laporan	35.000.000
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Karimun	1 Laporan	18.750.000	PAD	1 Laporan	18.750.000
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Asset OPD dalam kondisi baik		92%	137.000.000		92%	137.000.000
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Karimun	1 Unit	70.000.000	PAD	1 Unit	70.000.000
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Karimun	2 Unit	55.000.000	PAD	2 Unit	55.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Karimun	5 Unit	12.000.000	PAD	5 Unit	12.000.000
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		5.47-5.49			16.10 - 17.10	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		17,25			18,60	
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Tingkat Kesempatan Kerja		96,27%	50.000.000		97,58%	-
	Terwujudnya Rencana Tenaga Kerja							
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)		1 Dokumen	50.000.000		0	-
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Kab Karimun	20 Dokumen	50.000.000	PAD	0	-
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi		34,70%	1.040.050.000		38,00%	1.319.183.931
	Meningkatnya SDM Tenaga Kerja Lokal							
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi		43,32%	1.000.050.000		44,80%	1.279.183.931
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kab Karimun	320 Orang	952.700.000	PAD	330 Orang	1.231.833.931
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Kab Karimun	5 Unit	47.350.000	PAD	5 Unit	47.350.000
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja		62.642,33	40.000.000		63.851,25	40.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Kab Karimun	1 Dokumen	40.000.000	PAD	1 Dokumen	40.000.000
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri)		75%	250.000.000		80%	300.000.000
	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Persentase Pekerja Informal		31,70%			30,25%	
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja yang Mendapatkan Bimbingan Pelayanan Antar Kerja		95%	65.000.000		96%	85.000.000
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Kab Karimun	20 Orang	20.000.000	PAD	20 Orang	25.000.000
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Kab Karimun	5 Orang	10.000.000	PAD	5 Orang	15.000.000
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Kab Karimun	20 Orang	35.000.000	PAD	20 Orang	45.000.000
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Informasi Pasar Kerja		650 Informasi Pasar Kerja	165.000.000		675 Informasi Pasar Kerja	190.000.000
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Kab Karimun	1 Dokumen	15.000.000	PAD	1 Dokumen	20.000.000
2.07.04.2.03.0003	Job Fair / Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair / Bursa Kerja	Kab Karimun	50 Orang	150.000.000	PAD	50 Orang	170.000.000
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan)		1 Dokumen	20.000.000		1 Dokumen	25.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Kab Karimun	30 Orang	20.000.000	PAD	30 Orang	25.000.000
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Penyelesaian Perkara yang difasilitasi		2 Perkara	440.000.000		3 Perkara	440.000.000
	Terwujudnya Hubungan Industrial Yang Harmonis							
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Memiliki Peraturan Perusahaan (PP)		26%	145.000.000		27%	145.000.000
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kab Karimun	1 Laporan	145.000.000	PAD	1 Laporan	145.000.000
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Berselisih		1,50%	295.000.000		1,25%	295.000.000
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kab Karimun	1 Lembaga	65.000.000	PAD	1 Lembaga	65.000.000
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Kab Karimun	20 Orang	230.000.000	PAD	20 Orang	230.000.000
		Rasio PDRB Industri Pengolahan		15.10 - 16.10			16.10 - 17.10	
		Kontribusi industri non migas terhadap PDRB		17,25			18,60	
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri non migas		27,40%	150.000.000		28,12%	200.000.000
	Meningkatnya nilai tambah sektor Industri							
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Industri yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan		70%	150.000.000		75%	200.000.000
3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kab Karimun	1 Dokumen	100.000.000	PAD		-
3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Karimun		-	PAD	1 Dokumen	100.000.000
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	PAD	1 Dokumen	50.000.000
3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Karimun		-	PAD	1 Dokumen	50.000.000
3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Industri yang Menerapkan Regulasi Industri		51%	50.000.000		52%	100.000.000
	Terwujudnya Penerapan Regulasi Industri							
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah industri yang diberi pendampingan dan pembinaan		51%	50.000.000		52%	100.000.000



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2026

3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	PAD	1 Dokumen	100.000.000
3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Industri yang menyampaikan data pada SIINas		6,10%	50.000.000		8,20%	50.000.000
	Terwujudnya Informasi Industri yang lengkap dan terkini							
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Data Industri di SIINas		1 Dokumen	50.000.000		1 Dokumen	50.000.000
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Karimun	1 Dokumen	50.000.000	PAD	1 Dokumen	50.000.000
TOTAL PAGU ANGGARAN					7.824.005.438			7.944.639.366



BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026, telah disusun berdasarkan acuan dan data-data konkrit dari dokumen-dokumen anggaran yang ada, serta hasil konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait.

Dengan adanya Dokumen Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian ini diharapkan penerapan dan pelaksanaan Program serta Kegiatan yang diemban oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun betul-betul dapat menjawab tantangan Ketenagakerjaan dan Perindustrian yang ada di Kabupaten Karimun,

Demikianlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Karimun Tahun 2026 ini disusun, dengan harapan semoga dokumen ini dapat menjadi acuan dan pengarah pelaksanaan semua Program dan Kegiatan di Tahun 2026 mendatang, terakhir kami menyadari bahwa dokumen ini masih ada beberapa kelemahan, untuk diharapkan dari semua unsur yang terlibat (*stakeholders*) dapat memberi masukan demi penyempurnaan dokumen ini, terima kasih.